

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN KADER PARTAI  
POLITIK PADA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Israfil Manata Putra,<sup>1</sup> Aries Singi,<sup>2</sup> Mulyadi,<sup>4</sup> Moh. Gafar<sup>5</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdul Azis  
Lamadjido, Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Palu,  
Indonesia.

Email: israfilm18@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Rekrutmen Kader Partai Pada Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Teori yang digunakan dari Merilee S Grindle. Semua data akan diinventarisir dan diolah serta dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Rekrutmen Kader Partai Pada Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah belum memenuhi harapan. Misalnya kelompok sasaran yang dipengaruhi khususnya para kader yang direkrut, masih pada persoalan kuantitasnya belum menyentuh pada kualitasnya. Manfaat yang diperoleh untuk mendapatkan kader yang berkualitas sehingga dapat memberikan derajat perubahan yang diinginkan. Kedudukan pembuat kebijakan sangat berpengaruh besar pada proses implementasi atau siapa pelaksana program hal ini sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Untuk dapat terlaksananya program yang baik maka dibutuhkan sumber daya yang memadai. Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan rekrutmen kader partai dampak yang ditimbulkan dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat yakni kepentingan politik, karakteristik lembaga yang melaksanakan kebijakan sangat menentukan keberhasilan kebijakan rekrutmen kader partai politik.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan Rekrutmen Kader Partai

## **ABSTRACT**

*The objective of this research was to find out and analyze the implementation of Cadre Recruitment Policy on Amanat Nasional Party of Palu City in Central Sulawesi Province. Theory used from Merilee S Grindle. Whereas the technique of data collection done through observation, in-depth interview and documentation. All the data were inventoried, proceeded and analyzed using qualitative descriptive data analysis. The research results show that the implementation of Cadre Recruitment Policy on Amanat Nasional Party of Palu City in Central Sulawesi Province have not fulfilled the expectation. The example can be shown like the inadequacy in quality of cadre recruited. The benefit can be obtained in getting the quality of cadre so that it can give a big change expected. The position of policy maker give very big influence on the process of the implementation and the budget of the party. To get it, it needs adequate human resources. Meanwhile the impact of the implementation of policy influenced by authority, interest and involved actor strategy to determine the successfulness of politics party cadre recruitment policy, the obedience and response of the implementor at Amanat Nasional party have not been suitable to what stated in basic budget and party household budget. Therefore, it can be concluded that recruiting of the cadre should considered the quality.*

**Keywords:** *Party Cadre Recruitment Policy Implementation*

## **A. PENDAHULUAN**

Reformasi 1998 telah mengubah wajah Indonesia dan membuat bangsa Indonesia mengalami kemajuan di berbagai bidang. Partai Amanat Nasional, partai yang lahir dari rahim gerakan reformasi memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal reformasi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi telah mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia.<sup>1</sup>

Pengakuan sebagai negara demokratis terbesar keempat diberikan, terutama setelah Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu 2004 yang luber dan jurdil sebagai sebuah mekanisme sirkulasi kepemimpinan bangsa secara damai, berlangsung tanpa sesuatu apa pun yang terjadi. Di era reformasi sangat dibutuhkan

---

<sup>1</sup> Thoha, Miftah, 1994, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

partai politik yang kuat dan berkesinambungan, yang mampu mewakili masyarakat dan menawarkan pilihan kebijakan yang mencerminkan kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia telah bersepakat dan bertekad menganut demokrasi dan melaksanakannya secara konsisten. Salah satu ciri demokrasi adalah adanya pemilu sebagai mekanisme mendudukan para wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam partai politik. Dalam konteks ini, lembaga legislatif sebagai salah satu pilar penopang demokrasi harus mampu menjadi representasi atau cerminan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa (Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua; tidak ada kerancuan dalam kebenaran). Semangat mulia inilah yang kemudian melahirkan seluruh bangsa untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan kepada Pancasila sebagai Idiologi negara-bangsa yang menempatkan identitas kelompok yang ada duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di hadapan negara. Karena itu kita harus mampu menjabarkan dalam berbagai bentuk undang-undang dan peraturan menjadi turunannya, sehingga praktek demokrasi yang muncul tidak keluar dari ruhnyanya.

Berlandaskan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 29 ayat 1 Partai melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi :

- a. Anggota Partai Politik.
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

---

<sup>2</sup> Uno, Hamzah B, 2006, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Bumi Aksara, Jakarta.

#### d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis sesuai dengan AD dan ART.
3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART.

Berdasarkan amanat undang-undang partai politik bahwa penetapan atas rekrutmen kader partai dilakukan oleh pengurus partai berdasarkan AD dan ART partai politik yang bersangkutan. Berikut ini penulis paparkan AD dan ART Partai Amanat Nasional yang dijadikan obyek dari penelitian ini yakni: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.<sup>3</sup>

##### Pasal 5 Jenjang kaderisasi:

1. Jenjang dan kaderisasi terdiri atas pengkaderan formal dan nonformal.
2. Jenjang kaderisasi formal terdiri dari atas:
  - a. Kader muda yaitu mereka yang dalam keanggotaan partai yang tercatat oleh dewan pimpinan setempat setelah lulus orientasi perkaderan dalam masa bimbingan anggota (MABITA).
  - b. Kader dasar yaitu mereka yang dalam keanggotaan partai yang tercatat oleh Dewan Pimpinan Daerah

---

<sup>3</sup> Waworuntu, Bob. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

setempat setelah lulus Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD).

- c. Kader Madya yaitu mereka yang dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Pimpinan Wilayah setempat setelah lulus Latihan Kader Amanat Madya (LKAM).
- d. Kader Utama yaitu mereka yang dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah lulus Latihan Kader Amanat Utama (LKAU).

Berdasarkan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional mengenai rekrutmen politik pada kader belum terlaksana dengan baik sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti persoalan ini dengan memakai teori dari Merilee S. Grindle yang melihat Implementasi Kebijakan dari Isi Kebijakan (*Content of Policy*) meliputi: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) Jenis manfaat yang dihasilkan. (3) Derajat perubahan yang diinginkan; (4) Kedudukan pembuat kebijakan; (5) Siapa pelaksana program; (6) Sumber daya yang dikerahkan. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) meliputi: (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatuhan dan daya tangkap.<sup>4</sup>

Oleh karena itu mengacu pada teori implementasi kebijakan public yang dikemukakan Merelle Grindle (1980) bahwa di Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu Implementasi kebijakan rekrutmen kader partai politik di lihat dari isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan tersebut yang cenderung berdampak dari aktivitas politik dalam proses pembuatan kebijakan rekrutmen kader di Partai Amanat Nasional kata Palu.

---

<sup>4</sup> Wood, Jack & Joseph Wallace & Rachid M. Zeffane, 2001. *Organizational Behavior a Global Perspectives*. Australia : John Willey & Sons.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Implementasi kebijakan rekrutmen kader partai politik
2. Bagaimana proses pembuatan kebijakan rekrutmen kader di Partai Amanat Nasional kata Palu.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Proses ini kemudian didesain sedemikian rupa untuk digunakan peneliti dalam mencari sesuatu tersebut. Suatu penelitian ilmiah tentunya perlu didesain agar dapat memberi arah yang jelas dan terencana sesuai dengan yang akan dilaksanakan peneliti.<sup>5</sup> Ada beberapa definisi tentang desain penelitian diantaranya, Nasution mengemukakan bahwa desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian.<sup>6</sup>

Pertama, desain merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kedua, desain merupakan kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antara variabel dalam kajian tersebut. Ketiga, desain merupakan cetak biru yang memberi garis besar dari setiap prosedur mulai dari hipotesis sampai analisis data.

Untuk desain penelitian deskripsi, menurut Nasir (1998:105) mengemukakan bahwa desain penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Desain

---

<sup>5</sup> Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Bina Aksara: Jakarta.

<sup>6</sup> Nasution. 2002. *Metode Penelitian*. Alfabeta: Bandung.

ini juga untuk mengenal fenomena-fenomena yang terjadi pada populasi dalam rangka studi atau analisis selanjutnya.<sup>7</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat diperoleh keterangan bahwa desain penelitian pada dasarnya adalah proses yang direncanakan dan dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan demikian desain penelitian memberi arah dan pedoman bagi peneliti dalam proses penelitian yang akan dilaksanakannya. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan analitis tentang sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa selain relevan dengan permasalahan yang diteliti, juga sangat mudah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan Mei sampai Juli 2013.

Yang dimaksud dengan:

a. Isi kebijakan adalah:

1. Kepentingan yang dipengaruhi: semakin banyak semakin sulit di implementasikan
2. Jenis manfaat yang diperoleh: kebijakan yang memberi manfaat aktual dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah di implementasikan
3. Derajat perubahan yang diinginkan: perubahan sikap dan perilaku akan sulit dilakukan
4. Kedudukan/posisi pembuat kebijakan

---

<sup>7</sup> Subarsono. 2005. *Implementasi Kebijakan Rekrutmen Kader*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

5. Siapa pelaksana program
  6. Sumber daya yang dikerakan
- b. Lingkungan kebijakan adalah:
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
  2. Karakteristik lembaga dan penguasa
  3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus, kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu dan masyarakat. Penentuan informan secara purposive sampling yakni memilih orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari pengurus 2 orang, kader 2 orang dan masyarakat 2 orang. Sedangkan yang ditetapkan sebagai informan kunci (key informants) adalah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) kota palu.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Observasi (pengamatan) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti di lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2005:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, sehingga dalam observasi dapat diperoleh data mengenai rekrukmen kader seperti pendidikan kader muda, kader dasar, kader madya dan kader utama yang berkesinambungan dan bertujuan melahirkan kader yang

patriotik, amanah dan mandiri di Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu.

2. Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada responden penelitian baik yang menjadi sampel penelitian maupun responden yang bertindak informan. Menurut Sugiyono (2008:162) teknik wawancara terdiri atas dua tahap yaitu wawancara pendahuluan dengan tujuan untuk menciptakan keakraban antara peneliti dengan informan dan selanjutnya wawancara mendalam dengan tujuan untuk mengalami pengetahuan informan tentang rekrutmen kader partai.
3. Dokumentasi (dukumentation) adalah cara pengumpulan data-data sekunder seperti gambar-gambar, dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperoleh atau dipergunakan dalam penelitian berupa daftar pertanyaan dan alat-alat tulis-menulis.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2005:80) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Spradley dalam Sugiyono (2005:85) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal

itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### 1. Isi Kebijakan (Content of Policy) meliputi:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan ialah rekrutmen kader di Partai amanat nasional kota Palu sudah berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dimana dalam hal ini rekrutmen tidak hanya melihat jumlah kader atau kuantitasnya tetapi jauh lebih penting kemampuan kader atau kualitasnya. Inilah hal yang mendasar isi kebijakan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.<sup>8</sup>

Jenis manfaat yang dihasilkan dengan melaksanakan rekrutmen kader yang bukan hanya persoalan kuantitas, tetapi dengan melihat kualitasnya maka mamfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat Khususnya masyarakat kota Palu dimana peneliti melakukan penelitian. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

---

<sup>8</sup> Platform, Anggaran Dasarr dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional

Derajat perubahan yang diinginkan dengan rekrutmen kader yang tidak hanya mengandalkan kuantitas tetapi selalu melihat pada persoalan kualitasnya sudah pasti akan meningkatkan derajat perubahan yang diinginkan; Kedudukan pembuat kebijakan pada rekrutmen kader sangat menentukan didalam pengimplementasian kebijakan tersebut di Partai Amanat Nasional kota palu sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai;

Siapa pelaksana program sama halnya dengan pembuat kebijakan kalau pelaksana program tidak melaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan program tersebut sulit untuk terelisir. Hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggan partai.<sup>9</sup> Sumber daya yang dikerahkan dalam proses rekrutmen kader pada partai amanat nasional Kata Palu sudah sangat memadai sesusai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Dari isi kebijakan dalam rekrutmen kader partai pada partai amanat nasional kota Palu, peneliti melihatnya sudah sangat baik sebagaimana harapan dari public. Yakni merekrut kader tidak hanya melihat jumlah atau kuantitas kader tetapi jauh lebih penting pada kemampuan atau kualitas kader.

2. Konteks Implementasi (Context of Implementation), meliputi:

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam persoalan ini sangat menentukan keberhasilan dari rekrutmen kader tersebut. Di Partai

---

<sup>9</sup> Surya Dharma, 2005. *Manajemen Kinerja, Falsafah teori dan penerapannya*, Jakarta:Pustaka Pelajar.

Amanat Nasional Kota palu rekrutmen kader masih pada persoalan kuantitas belum menyentuh pada persoalan kualitas; Karakteristik lembaga dan penguasa didalam merekrut kader, partai amanat nasional Kota Palu sudah memperlihatkan karakteristik, baik lembaganya maupun penguasanya. Tetapi masih pada tataran presedural belum menyentuh pada persoalan subtansial.<sup>10</sup> Kepatuhan dan daya tangkap para pelaksana program rekrutmen kader partai di partai amanat nasional Kota Palu belum memenuhi harapan yang diinginkan. Dimana yang idealnya merekrut kader tidak hanya melihat pada kuantitas tetapi jauh lebih penting pada persoalan kualitas.

Menurut grindle bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memungkinkan sasaran kebijakan public dapat terealisasikan sebagai hasil dari aktivitas partai politik, dimana implementasi mencakup upaya menciptakan suatu *policy decivery system*, yang merancang sarana spesifik untuk di laksanakan agar dapat mencapai tujuan akhir yang dinyatakan dalam bentuk kebijakan.<sup>11</sup>

Dari pendapat para ahli dipadukan dengan pengamatan dan hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa dalam proses rekrutmen kader partai pada partai amanat nasional (PAN) kota Palu sudah melaksanakan proses rekrutmen dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang wajib dilaksanakan oleh semua pengurus partai politik dalam rangka mendapatkan kader yang bisa diandalkan dalam semua kegiatan partai. Namun masih pada tataran procedural belum menyentuh pada tataran subtansial arti partai amanat nasional kota Palu

---

<sup>10</sup> Suratno, 2012. *Konsep Pelayanan Publik*. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kab. Kepl. Sitaro. kemenag.go.id/file/ file/kepegawaian/ ikmo 1341 29 20 12. Pdf) di Ases 1 Juni 2013.

<sup>11</sup> Platform, Anggaran Dasarr dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.

dalam merekrutkan kader masih melihat pada kuantitas kader belum menyentuh pada kualitas kader.<sup>12</sup>

Inilah hal yang perlu dibenahi oleh pengurus partai amanat nasional kota Palu yakni partai merekrut kader pada saat mendekati pemilu dan pilkada belum secara kontinyu, serta rekrutmen masih pada tataran kuantitas belum pada tataran kualitas. Idialnya partai dalam merekrut kader tidak hanya pada saat-saat partai melakukan gaweannya tetapi berlangsung secara kontinyu dan rekrutmen tidak hanya mengejar jumlah kader atau kuantitas kader tetapi jauh lebih penting pada kemampuan kader atau kualitas kader.

#### **E. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan Implementasi Kebijakan Rekrutmen Kader Partai pada Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu belum terlaksana secara optimal dilihat dari konteks implementasi (context of implementation) sedangkan isi kebijakan (Content of Policy) sudah sangat bagus. Dimana rekrutmen kader masih pada tataran procedural belum menyentuh pada tataran substansial. Yakni rekrutmen kader hanya melihat pada kuantitas kader atau banyaknya kader, belum menyentuh pada persoalan kualitas kader atau kemampuan kader.

#### **F. SARAN**

1. Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi kebijakan rekrutmen kader partai politik pada partai amanat nasional (PAN) Kota Palu diharapkan para kader yang dipercayakan dalam bagian rekrutmen. Agar supaya memperhatikan, bahwa dalam merekrut kader bukan hanya melihat jumlah kader atau

---

<sup>12</sup> Steers, Richard M., 1997. *Effektivitas Organisasi*, Kajian Perilaku. Terjemahan Jakarta: Erlangga

hanya mengejar kuantitasnya tetapi jauh lebih penting merekrut kader dengan melihat kualitasnya.

2. Untuk mendapatkan kader yang mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan partai diharapkan para aktor yang terlibat dalam proses Implementasi kebijakan rekrutmen kader partai politik pada partai amanat nasional (PAN) Kota Palu agar supaya melaksanakan rekrutmen tidak hanya pada saat mendekati pemilu saja tetapi dilaksanakan secara berkesinambungan dalam artian tidak hanya pada saat pelaksanaan pesta demokrasi dilaksanakan.
3. Diharapkan dalam merekrut kader selalu melihat latar belakang

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **A. Buku-buku**

- , 1990, Dasar-Dasar Organisasi Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2004, Pengembangan Kepribadian Pegawai, Mandar Maju, Bandung.
- , 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara:Jakarta
- , 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- , 2008. *Metode Penelitian Administrasi Jilid II*. Alfabeta: Bandung.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.

- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Bina Aksara: Jakarta.
- Nasution. 2002. *Metode Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Platform, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional
- Riduwan, 2005, Skala Pengukuran variable-variabel penelitian, Alfabeta, Jakarta.
- Sampara, Lukman, 2006. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA-LAN RI Press.
- Samsudin, Sadili, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Pustaka Setia.
- Sangkala, 2012. *Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI)
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan Yang Baik*, Bandung: PT.Rifika Aditama
- Siagian, Sondang P, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sianipar. 1998. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, LAN.Jakarta
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: YKPN
- Sinambela, Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sopiah, 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Steers, Richard M., 1997. *Efektivitas Organisasi, Kajian Perilaku*. Terjemahan Jakarta: Erlangga
- Subarsono. 2005. *Implementasi Kebijakan Rekrutmen Kader*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung

- Suratno, 2012. Konsep Pelayanan Publik. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kab. Kepl. Sitaro. kemenag.go.id/file/ file/kepegawaian/ ikmo 1341 29 20 12. Pdf) di Ases 1 Juni 2013.
- Surya Dharma, 2005. Manajemen Kinerja, Falsafah teori dan penerapannya, Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah,1994, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tua Effendi, Marihot, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo, Jakarta.
- Umam, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung: CV.Pustaka Setia
- Undang-Undang Nomor 2 Tentang Partai Politik.
- Uno, Hamzah B, 2006, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Waworuntu, Bob. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Widjaya, 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Wood, Jack & Joseph Wallace & Rachid M. Zeffane, 2001. Organizational Behavior a Global Perspectives. Australia : John Willey & Sons.